



Studi Komparatif Program Makan Bergizi Gratis Indonesia dan *School Meal Program* Korea Selatan

Comparative Analysis of Indonesia's Free Nutritious Meal Program and South Korea's School Meal Program

Ririn Dwi Ariyani¹, Riza Adelia Suryani²

Universitas Sriwijaya

Email : ririnariyani1234@gmail.com¹, rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 14-06-2026

Revised : 16-06-2026

Accepted : 18-06-2026

Published : 20-06-2026

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of Indonesia's priority policies aimed at improving community nutrition while strengthening human resource development. As a newly introduced policy, the program continues to encounter several implementation challenges. This study seeks to compare the implementation of Indonesia's Free Nutritious Meal Program and South Korea's School Meal Program using George C. Edwards III's policy implementation framework, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative approach with a comparative literature review method was employed. The study utilized secondary data obtained from academic journals, policy documents, government regulations, and official reports. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on Edwards III's four implementation variables. The findings reveal that South Korea's School Meal Program demonstrates a more established implementation system, supported by effective communication, adequate resources, strong implementer commitment, and a well-organized bureaucratic structure. In contrast, Indonesia's MBG program still faces challenges related to inter-agency coordination, human resource readiness, infrastructure availability, and monitoring mechanisms. The study concludes that successful policy implementation depends on the interaction between effective communication, sufficient resources, implementer commitment, and an efficient bureaucratic structure.

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, School Meal Program, Comparative Public Administration*

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai program yang masih berada pada tahap awal pelaksanaan, MBG menghadapi berbagai tantangan dalam proses implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dengan *School Meal Program* di Korea Selatan melalui pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur komparatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah. Analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *School Meal Program* di Korea Selatan memiliki sistem implementasi yang lebih mapan karena didukung oleh komunikasi yang



efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana yang tinggi, serta struktur birokrasi yang jelas dan terintegrasi. Sementara itu, implementasi MBG di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarlembaga, kesiapan sumber daya manusia, pemerataan sarana pendukung, dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan program.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, *School Meal Program*, Administrasi Publik Komparatif.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan Thomas R.Dye “*is whatever governments choose to do or not to do*” dapat dipahami bahwa kebijakan publik berperan sebagai segala bentuk tindakan maupun keputusan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Guntur, 2019). Keberhasilan sebuah kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan suatu program, tetapi juga sebagai proses untuk memahami berbagai tindakan, aktivitas dan mekanisme yang terjadi setelah kebijakan diberlakukan (Kendi, 2024). Menurut Anggara (dalam Kendi, 2024) implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang muncul setelah kebijakan disahkan, baik yang berhubungan dengan proses administrasi pelaksanaan maupun dampak nyata yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Salah satu kebijakan publik yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini direncanakan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas balita, peserta didik, serta ibu hamil. Dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp.450 Triliun per tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Nurwakhid & Fridiyanti, 2025). Pelaksanaan program MBG didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menegaskan pentingnya penyediaan makanan bergizi secara merata. Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Meskipun memiliki tujuan yang strategis, implementasi program pada tahap awal masih menghadapi berbagai tantangan antara lain keterbatasan anggaran, kesiapan infrastruktur distribusi pangan yang belum merata, pengawasan kualitas gizi yang masih perlu diperkuat serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan program dalam memastikan setiap penerima manfaat memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang aman, berkualitas dan berkelanjutan (Rahmawati, 2026).

Program penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik telah menjadi praktik yang umum diterapkan di berbagai negara maju. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang telah



menerapkan program makan gratis bagi siswa sekolah sejak tahun 2011 secara bertahap, dimulai dari sekolah dasar dan kemudian diperluas ke tingkat menengah (Tjoneng, 2025). Program ini dikembangkan sebagai respon pemerintah Korea Selatan terhadap meningkatnya kesenjangan sosial yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan capaian akademik peserta didik. Melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis dan merata bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi, pemerintah Korea Selatan berupaya menciptakan kesempatan belajar yang lebih setara serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas secara berkelanjutan (Hardiantoro, 2025).

Keberhasilan *School Meal Program* di Korea Selatan ini merupakan hasil dari berbagai perbaikan yang dilakukan selama proses implementasi kebijakan. Pada tahap awal pelaksanaannya program ini menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pendanaan yang masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi dana dan penyediaan makanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata, khususnya daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah Korea Selatan kemudian menerapkan sistem pendanaan yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam pembiayaan serta pengelolaannya. Kejelasan regulasi serta pembagian tanggung jawab fiskal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi *School Meal Program* secara nasional (Tjoneng, 2025).

Keberhasilan implementasi *School Meal Program* di Korea Selatan memberikan peluang untuk melakukan kajian perbandingan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia. Dalam pandangan administrasi publik komparatif, perbandingan kebijakan publik digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan praktik penyelenggaraan program pemerintah pada konteks negara yang berbeda. Pendekatan ini tidak hanya mencakup perbandingan sistem pemerintahan dan kinerja birokrasi, tetapi juga analisis terhadap implementasi kebijakan publik yang dijalankan pada masing-masing negara (Salasiah, 2024). Melalui perbandingan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada masing-masing negara. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik (Namsa, 2026). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia maupun *School Meal Program* di Korea Selatan secara terpisah. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan implementasi kedua program tersebut menggunakan perspektif George C. Edwards III masih jarang ditemukan dalam literatur administrasi publik. Padahal, analisis komparatif diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pada masing-masing negara serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan pembelajaran dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai perbandingan implementasi kedua program untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk



menganalisis dan membandingkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dengan School Meal Program di Korea Selatan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan serta rekomendasi bagi penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur komparatif untuk membandingkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan School Meal Program di Korea Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui tahapan ekstraksi data serta sintesis kualitatif secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipetakan ke dalam matriks ringkasan literatur untuk mempermudah proses kategorisasi dan identifikasi temuan-temuan utama dari setiap sumber (Namsa, 2026). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat variabel utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengelompokkan berbagai temuan penelitian ke dalam keempat variabel tersebut. Selain itu, teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk membandingkan dan mensintesis temuan antar-literatur secara kritis sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan School Meal Program di Korea Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi Program Makan bergizi Gratis di Indonesia dan School Meal Program di Korea Selatan

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi akan berjalan secara efektif apabila tujuan, sasaran, dan ukuran kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan harus dikomunikasikan secara konsisten, akurat, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketidakjelasan informasi maupun lemahnya penyampaian kebijakan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara pelaksana sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan (Fauzan, 2024). Menurut Edwards III (1980), efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*) informasi yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan. Perbandingan implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.



Tabel 1. Perbandingan Aspek Komunikasi Program MBG Indonesia dan *School Meal Program* Korea Selatan.

No.	Aspek Komunikasi	Program Makan Bergizi Gratis (Indonesia)	<i>School Meal Program</i> (Korea Selatan)
1.	Transmisi (<i>Transmission</i>)	Informasi program telah disampaikan melalui pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan media massa (Badan Gizi Nasional, 2026b). Namun masih banyak tersebar isu negatif mengenai MBG di Indonesia	Program ini telah berjalan sejak tahun 1953 sebagai program bantuan pasca perang. Sehingga masyarakat tidak asing lagi dengan program ini. Walaupun sempat terhenti, program ini dijalankan lagi secara mandiri di setiap sekolah (Hardiantoro, 2025)
2.	Kejelasan (<i>Clarity</i>)	Tujuan program telah ditetapkan secara jelas melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 Namun beberapa petunjuk teknis dan mekanisme operasional masih mengalami penyesuaian sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan.	Tujuan, prosedur pelaksanaan, standar gizi, serta pembagian tugas diatur secara rinci dalam <i>School Meals Act</i> sehingga mudah dipahami oleh seluruh pelaksana program (Gaddis et al., 2025)
3.	Konsistensi (<i>Consistency</i>)	Kebijakan masih berada pada tahap awal implementasi sehingga masih terdapat penyesuaian target, mekanisme distribusi, dan pola pelaksanaan di berbagai wilayah.	Program telah berjalan dalam jangka panjang dengan standar operasional yang relatif stabil dan konsisten sehingga pelaksanaan program lebih seragam di seluruh sekolah.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam aspek komunikasi pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui Badan Gizi Nasional, kementerian kesehatan, pemerintah daerah, serta media massa untuk memperkenalkan tujuan dan mekanisme program kepada masyarakat. Namun, sebagai program yang masih berada pada tahap awal implementasi, proses penyampaian informasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan informasi, kejelasan petunjuk teknis, dan koordinasi antar pelaksana di berbagai daerah. Serta masih



maraknya penyebaran isu negatif mengenai MBG. Sebaliknya, Korea Selatan telah memiliki sistem komunikasi yang lebih matang karena *School Meal Program* telah diterapkan secara berkelanjutan selama bertahun-tahun (Gaddis et al., 2025). Informasi mengenai pelaksanaan program, standar gizi, penggunaan anggaran, serta evaluasi kegiatan disampaikan secara terstruktur kepada sekolah, orang tua, dan masyarakat sehingga menciptakan kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi *School Meal Program* di Korea Selatan dan sekaligus menjadi aspek yang perlu terus diperkuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Sumber Daya dalam Implementasi Program Makan bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan

Perbandingan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan pada variabel sumber daya dapat dianalisis melalui ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran dan kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Ringkasan perbandingan kedua program tersebut disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut,

Tabel 2. Perbandingan Aspek Sumber Daya Program MBG Indonesia dan *School Meal Program* Korea Selatan.

No.	Aspek Sumber Daya	Program Makan Bergizi Gratis (Indonesia)	School Meal Program (Korea Selatan)
1.	Sumber Daya Manusia	Pemerintah telah melibatkan Badan Gizi Nasional, SPPG, tenaga kesehatan, dan sekolah. Namun jumlah tenaga ahli gizi serta kapasitas pelaksana masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus keracunan dengan data mencatat, jumlah korban naik dari 5.360 kasus (di pertengahan September) menjadi 6.452 kasus per 21 September 2025. Dalam sepekan terdapat lebih dari 1000 kasus baru (Airlangga, 2026).	Didukung oleh tenaga profesional seperti <i>nutrition teacher</i> , <i>dietitian</i> , dan petugas pengelola makanan sekolah yang memiliki tugas dan kompetensi yang jelas. Program makanan sekolah saat ini menjadi saluran konsumsi terbesar produk pangan ramah lingkungan di Korea Selatan dengan kontribusi mencapai 28,3% dari total konsumsi pangan ramah lingkungan nasional yang terjamin kualitas gizinya (Gaddis et al., 2025)



<p>2.</p>	<p>Kewenangan dan Anggaran</p>	<p>Didukung oleh anggaran yang sangat besar melalui APBN serta koordinasi berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran dana yang didapatkan sebesar Rp268 triliun (Badan Gizi Nasional, 2026). Namun ditemukan kasus dugaan korupsi yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun, dimana total kerugian ini masih dalam proses perhitungan resmi oleh Kejaksaan Agung (Sumbaranews, 2026)</p>	<p>Pendanaan melalui desentralisasi dan skema pembiayaan bersama (cost sharing) yang melibatkan tiga pilar utama yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Anggaran ini dialokasikan dari pendapatan pajak daerah dan nasional dengan rata rata 5% dari total anggaran pendidikan pemerintah daerah disalurkan untuk UFEF. Kewenangan pelaksanaan diatur secara rinci dalam <i>School Meals Act</i>. Pada tahun 2023 Anggaran School Meal Program Korea Selatan mencapai sekittar 7,8 triliun won (USD 5,54 miliar) atau setara dengan sekitar Rp90 triliun (Gaddis et al., 2025)</p>
<p>3.</p>	<p>Sarana dan Prasarana</p>	<p>Masih menghadapi tantangan pada kesiapan dapur produksi, distribusi pangan, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur pendukung terutama di daerah terpencil (Rohim, 2025)</p>	<p>Memiliki fasilitas pengolahan makanan sekolah yang memadai, sistem distribusi pangan yang terintegrasi, serta dukungan <i>School Meal Service Support Center</i> untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.</p>

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan program MBG dan membentuk berbagai unit pelaksana seperti Badan Gizi Nasional serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga ahli gizi, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antar daerah, serta kesiapan infrastruktur distribusi pangan yang belum merata. Korea Selatan telah memiliki sistem sumber daya yang lebih matang melalui dukungan tenaga profesional seperti *nutrition teacher* dan dietitian,



sistem logistik pangan yang terintegrasi, serta pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *School Meal Program* di Korea Selatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kewenangan kelembagaan, dan sarana pendukung yang telah berkembang secara berkelanjutan.

Disposisi dalam Implementasi Program Makan bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan

Perbandingan disposisi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Aspek Disposisi Program MBG Indonesia dan *School Meal Program* Korea Selatan.

No.	Aspek Disposisi	Program Makan Bergizi Gratis (Indonesia)	School Meal Program (Korea Selatan)
1.	Kesadaran dan Pemahaman Pelaksana	Pemerintah pusat memiliki pemahaman yang kuat mengenai tujuan MBG sebagai upaya peningkatan gizi dan pembangunan SDM dengan membentuk Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama dalam mengelola dan mendistribusikan makanan bergizi.	Pelaksana program mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga tenaga gizi memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan program karena telah didukung regulasi dan praktik implementasi yang berlangsung lama.
2.	Penerimaan terhadap Kebijakan	Diterima dengan baik oleh masyarakat karena dianggap sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nasional, 2025)	Tingkat penerimaan terhadap program sangat tinggi karena <i>School Meal Program</i> telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan diterima sebagai hak peserta didik untuk memperoleh makanan bergizi di sekolah. Dan program ini telah lama dijalankan di Korea Selatan.
3.	Intensitas Komitmen Pelaksana	Komitmen pemerintah pusat cukup tinggi yang ditunjukkan melalui	Komitmen pelaksana sangat kuat dan berkelanjutan. Pemerintah, sekolah,



		alokasi anggaran besar dan pembentukan Badan Gizi Nasional. Namun intensitas pelaksanaan masih memerlukan penguatan melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih optimal. Dikarenakan masih banyak kasus dapur SPPG yang tidak memenuhi standar operasional atau tidak higienis (Nasional, 2025)	ahli gizi, serta orang tua secara aktif terlibat dalam pengawasan dan evaluasi program sehingga implementasi berjalan lebih konsisten. Pelaksanaannya juga dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan target capaian yang paling membutuhkan terlebih dahulu, setelah itu peningkatan target secara keseluruhan.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3 diatas, program Makan Bergizi Gratis di Indonesia telah memperoleh dukungan yang kuat dari pemerintah sebagai program prioritas nasional. Namun, kesiapan pelaksana di berbagai daerah masih memerlukan penguatan. Berbanding terbalik dengan *School Meal Program* di Korea Selatan yang menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi dan berkelanjutan karena didukung oleh pemerintah, sekolah, tenaga gizi, serta partisipasi orang tua. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa program ini hanya bisa diselenggarakan apabila seluruh komponen masyarakat turut mendukung dan berkomitmen untuk kesuksesan dan keberlanjutan program ini.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Makan bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan

Dalam penelitian ini, perbandingan struktur birokrasi antara Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan dianalisis berdasarkan aspek standar operasional prosedur, pembagian kewenangan, dan koordinasi antar lembaga pelaksana. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut,

Tabel 4. Perbandingan Aspek Struktur Birokrasi Program MBG Indonesia dan *School Meal Program* Korea Selatan.

No.	Aspek Struktur Birokrasi	Program Makan Bergizi Gratis (Indonesia)	<i>School Meal Program</i> (Korea Selatan)
1.	Standar Operasional Prosedur	Dasar hukum dan pedoman program telah tersedia, namun beberapa mekanisme teknis masih mengalami penyesuaian karena ditemukan adanya	SOP dan pedoman pelaksanaan telah diatur secara rinci dalam <i>School Meals Act</i> dan diterapkan secara konsisten di sekolah.



		dapur yang melanggar SOP atau beroperasi secara berlebihan.	
2.	Pembagian Kewenangan	Pembagian kewenangan sudah jelas terlampir dalam Buku Panduan Makan Bergizi Gratis. Dengan melibatkan Badan Gizi Nasional, Mitra Pengelola Satuan Pelayanan (SPPG), pegawai MBG dan pihak sekolah serta posyandu (Nasional, 2025)	Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan tenaga gizi telah ditetapkan secara jelas dalam regulasi.
3.	Koordinasi Antar Organisasi	Koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan karena banyaknya lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.	Koordinasi antar lembaga telah berjalan secara terstruktur dan terintegrasi sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program.

Struktur birokrasi berkaitan dengan pola organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Keterlibatan banyak lembaga menunjukkan adanya dukungan birokrasi yang luas, namun pada saat yang sama menuntut koordinasi yang lebih intensif agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. Sementara itu, *School Meal Program* di Korea Selatan didukung oleh struktur birokrasi yang lebih mapan dengan pembagian tugas dan kewenangan yang telah diatur secara jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta tenaga gizi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan struktur organisasi dan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi *School Meal Program* di Korea Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor yang paling membedakan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan *School Meal Program* di Korea Selatan terletak pada kesiapan sumber daya serta struktur birokrasi pelaksana. Korea Selatan telah memiliki sistem yang lebih matang karena didukung oleh sumber daya manusia profesional, pembagian kewenangan yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang terintegrasi. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap penguatan sistem implementasi karena program yang dijalankan relatif baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi yang efektif, menyediakan sumber daya yang memadai,



memperkuat komitmen pelaksana, dan menciptakan struktur birokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan keempat variabel implementasi menurut George C. Edwards III menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, F. (2026). *Makan Bergizi Gratis : Investasi SDM yang Butuh Tata Kelola Lebih Baik*. <https://pasca.unair.ac.id/makan-bergizi-gratis-investasi-sdm-yang-butuh-tata-kelola-lebih-baik/>
- Badan Gizi Nasional. (2026a). *BGN : Dari Rp.268T, 93% Anggaran digunakan Langsung untuk Bantuan MBG*. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-dari-rp268t-93-anggaran-digunakan-langsung-untuk-bantuan-mbg>
- Badan Gizi Nasional. (2026b). *BGN Tekankan Peran Komunikasi Publik dalam Keberhasilan Program MBG*. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tekankan-peran-komunikasi-publik-dalam-keberhasilan-program-mbg>
- Fauzan, A. (2024). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. 4, 17929–17938.
- Gaddis, J., Son, S., Robert, S., & Jeon, J. (2025). *Building a Public Good : Policy and Infrastructure Development in South Korea ' s Universal Free , School Lunch Program*. December.
- Guntur, M. (2019). *Analisis kebijakan publik*. 10.
- Hardiantoro, A. (2025). *Mengintip Program Makan yang Sudah Berjalan di Korea Selatan yang sudah berjalan 72 Tahun*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/10/083000865/mengintip-program-makan-bergizi-gratis-di-korea-selatan-yang-sudah-berjalan?page=all>
- Kendi, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik* (Y. Ahmad (ed.)). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Namsa, M. R. (2026). *Analysis Implementation of the Free Nutritious Meal Program(MBG) Policy in Indonesia (Edward III Implementation Model)*. 67–74.
- Nasional, K. B. (2025). *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*.
- Nurwakhid, M. A., & Fridiyanti, Y. N. (2025). *Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia*. 3, 314–324.
- Rahmawati, L. (2026). Scoping Review : Analisis Implementasi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan Negara Lain : Studi Komparatif Berdasarkan Kebijakan dan Efektivitas Program. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 67–76.
- Rohim, D. (2025). *MBG dan Permasalahannya*. <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/187>
- Salasiah, S. (2024). *Perbandingan Administrasi Publik* (A. Putro (ed.)). Tahta Media Group. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/668/683>
- Sumbaranews. (2026). *Kejagung Sedang Hitung Kerugian Rp1,1 Triliun di program MBG*. <https://sumbaranews.com/berita/nasional/kejagung-sedang-hitung-kerugian-rp11-triliun-di-program-mbg/>
- Tjoneng, V. &. (2025). Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis : Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 57–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v11i1.97>